An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Aspek Lingkungan dalam Studi Kelayakan Bisnis: Mitigasi Eksternalitas Ekologis dan Jaminan Keberlanjutan Operasional Korporasi

Abdul Majid Mushowir, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif signifikansi aspek lingkungan dalam kerangka penyusunan studi kelayakan bisnis sebagai instrumen pencegahan degradasi ekologis dan penjaminan keberlanjutan investasi. Di era modern, kelayakan suatu proyek bisnis tidak lagi semata-mata diukur melalui parameter rasio finansial atau daya serap pasar, melainkan mutlak harus memperhitungkan eksternalitas dampaknya terhadap kelestarian alam hidup sekitarnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis telaah studi kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berfungsi esensial sebagai perisai mitigasi risiko hukum, penolakan sosial, dan bencana ekologis. Selain itu, integrasi konsep *Triple Bottom Line* (keuntungan, manusia, dan planet) sukses mengangkat reputasi perusahaan di mata konsumen global. Kesimpulannya, pemenuhan kelayakan aspek lingkungan bukan sekadar beban biaya pemenuhan regulasi birokrasi, melainkan fondasi hakiki yang menentukan kedaulatan, keamanan, dan usia panjang operasional sebuah entitas bisnis.

Kata Kunci: Aspek Lingkungan, Studi Kelayakan Bisnis, AMDAL, Keberlanjutan Ekologis, Eksternalitas.

Abstract

This study aims to qualitatively analyze the significance of environmental aspects within the framework of preparing a business feasibility study as an instrument to prevent ecological degradation and guarantee investment sustainability. In the modern era, the feasibility of a business project is no longer solely measured by financial ratio parameters or market absorption but must absolutely account for its externality impact on the preservation of the surrounding natural environment. The research approach used is a descriptive qualitative method based on a comprehensive literature review. The results prove that the implementation of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) functions essentially as a mitigation shield against legal risks, social rejection, and ecological disasters. In addition, the integration of the Triple Bottom Line concept (profit, people, and planet) successfully elevates the company's reputation in the eyes of global consumers. In conclusion, fulfilling the feasibility of environmental aspects is not merely a cost burden for bureaucratic regulatory compliance, but the

true foundation that determines the sovereignty, security, and long-term operational lifespan of a business entity.

Keywords: *Environmental Aspect, Business Feasibility Study, AMDAL, Ecological Sustainability, Externalities.*

Pendahuluan

Penyusunan kerangka studi kelayakan bisnis merupakan instrumen navigasi yang sangat krusial bagi setiap penanam modal sebelum merealisasikan kucuran dana investasi raksasa ke dalam pembangunan fasilitas proyek komersial. Pada paradigma bisnis klasik di masa lampau, evaluasi kelayakan proyek sering kali hanya didominasi secara sempit oleh perhitungan kedalaman kelayakan rasio margin finansial, kapasitas penguasaan pangsa pasar, dan kesiapan infrastruktur mesin teknis belaka. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan ancaman perubahan iklim dan daya dukung bumi yang semakin kritis, parameter penilaian kelayakan investasi telah mengalami pergeseran transformasi struktural yang sangat radikal. Dewasa ini, pengkajian mendalam terhadap aspek kelayakan pelestarian kelestarian lingkungan hidup menempati urutan prasyarat mutlak yang tidak dapat lagi dipandang sebelah mata ataupun sekadar disiasati kepatuhannya.

Aspek lingkungan di dalam dokumen studi kelayakan bisnis bertindak sebagai instrumen penyaring yang menyeimbangkan antara nafsu agresivitas eksploitasi pencetakan laba korporasi dengan daya tahan kapasitas restorasi ekosistem alam sekitarnya. Setiap wujud pendirian bangunan instalasi pabrik manufaktur, perkebunan, maupun pertambangan dipastikan akan selalu menghasilkan dampak turunan limbah residu yang mengintervensi keseimbangan habitat flora, fauna, serta kualitas udara dan air tanah. Kegagalan pihak manajemen merumuskan rancangan instalasi pengolahan air limbah atau mitigasi polusi udara akan seketika mengubah proyek bisnis tersebut menjadi mesin pencetak bencana kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum positif negara mewajibkan secara mutlak dilampirkannya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau standar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai gerbang awal perizinan operasi.

Realitas dinamika persinggungan antara operasional perniagaan perusahaan dengan kelestarian ekosistem alam acap kali memicu letupan konflik sengketa horizontal yang teramat sangat pelik. Kerusakan lingkungan yang bersumber dari kebocoran limbah pabrik sering kali secara langsung mematikan sumber mata pencaharian ekonomi warga lokal, semisal musnahnya panen tambak ikan nelayan atau rusaknya kesuburan lahan sawah petani akibat pencemaran logam berat. Keresahan dan

amarah komunal masyarakat yang merasa ruang hidupnya dirampas dieksploitasi ini akan berujung pada gelombang aksi unjuk rasa, pemboikotan produk, hingga penutupan paksa gerbang operasional pabrik oleh otoritas penegak hukum. Rentetan musibah letupan sosial ekologis inilah yang menjadi hantu ancaman risiko terbesar perusak kelangsungan nyawa kelayakan investasi yang gagal merumuskan analisis lingkungannya secara jujur.

Di lanskap arena persaingan bisnis global masa kini, komitmen pemeliharaan etika lingkungan hidup juga telah menjelma menjadi senjata pamungkas penentu keunggulan daya saing reputasi merek perusahaan. Konsumen modern dan para investor institusional tingkat dunia kini semakin cerdas menerapkan penapisan ketat untuk memboikot produk barang atau menghindari kepemilikan saham dari korporasi perusak kelestarian hutan atau penyumbang emisi karbon tertinggi. Kesadaran akan konsep *Triple Bottom Line* yang menyeimbangkan pengejaran keuntungan (*profit*), kepedulian manusia (*people*), dan pelestarian bumi (*planet*) memaksa korporasi untuk merombak total perancangan teknologinya menjadi berbasis ekonomi hijau (*green economy*). Kesigapan manajemen mengintegrasikan inovasi teknologi ramah lingkungan ke dalam proposal kelayakan investasi adalah daya pemikat terkuat mendatangkan kucuran permodalan luar negeri.

Meskipun urgensi kedudukan instrumen pembedahan aspek lingkungan ini telah diakui secara luas dalam berbagai landasan perundang-undangan, literatur akademik kualitatif yang mengupas filosofi dan implikasi implementasinya dalam kerangka kelayakan bisnis masih perlu diperkaya. Kajian akademik terdahulu sering kali hanya memosisikan AMDAL sebatas dokumen pelengkap prasyarat teknis administrasi birokrasi, tanpa menyentuh kedalaman relasi kausalitasnya terhadap keabadian stabilitas finansial dan reputasi sosiologis korporasi. Berlandaskan pada pemaparan deskripsi latar belakang rentetan ancaman risiko dan urgensi identifikasi celah kekosongan kepustakaan tersebut, penulisan manuskrip artikel jurnal ini sengaja dirancang menelusuri ketajaman aspek lingkungan. Kajian ini diharapkan mampu menawarkan kerangka pedoman aplikatif bagi jajaran direksi untuk menjadikan kelayakan ekologis sebagai roh landasan pengambilan keputusan penanaman investasi jangka panjang yang beradab.

Kajian Teori

Konsep Aspek Lingkungan dan AMDAL Aspek lingkungan dalam ruang lingkup penyusunan dokumen studi kelayakan bisnis secara hakiki merupakan proses identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi atas seluruh potensi perubahan kondisi biogeofisik serta kimiawi alam yang diakibatkan

oleh aktivitas proyek. Kajian komprehensif ini menuntut para analis kelayakan untuk membedah secara presisi daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) lokasi pembangunan proyek, mulai dari tahap prakonstruksi, operasi harian, hingga tahap pascaoperasi atau penutupan pabrik. Fokus telaah ini mencakup pengukuran indikator penurunan kualitas air tanah, lonjakan volume emisi gas buang polusi udara, ancaman abrasi, hingga ketersediaan skema lahan hijau resapan air. Ketiadaan rumusan penanganan atas potensi kerusakan elemen alam tersebut akan langsung menjatuhkan vonis tidak layak bangun pada proyek bersangkutan.

Instrumen legal formal yang menjadi ujung tombak pembuktian kesahihan kelayakan aspek ini adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Konsep AMDAL merupakan perwujudan kajian mendalam mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang mutlak diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan izin kenegaraan. Desain arsitektur penyusunan dokumen ini tidak boleh dikerjakan secara serampangan, melainkan wajib melibatkan kepakaran tim ahli lingkungan bersertifikasi independen, serta mewajibkan pelibatan partisipasi keterbukaan informasi konsultasi publik bersama masyarakat terdampak di sekitar lokasi tapak proyek. Dokumen AMDAL inilah yang menjadi landasan kontrak kesepakatan hukum antara perusahaan, negara, dan rakyat mengenai jaminan pengawalan pelestarian kelestarian bumi tempat mereka berpijak.

Keberlanjutan Bisnis (Business Sustainability) dan Eksternalitas
Dalam pandangan teori makroekonomi modern, setiap pendirian operasional mesin pabrikan industri komersial dipastikan akan melahirkan efek samping atau eksternalitas (*externality*) yang dampaknya menetes dirasakan langsung oleh pihak ketiga di luar sirkulasi transaksi pasar. Eksternalitas negatif, seperti polusi suara bising mesin, pembuangan limbah beracun, dan kerusakan jalan desa akibat lalu lalang truk tonase berat perusahaan, merupakan beban biaya sosial yang sering kali enggan dimasukkan ke dalam catatan pembukuan akuntansi beban pengeluaran internal korporasi. Studi kelayakan pada aspek lingkungan bertugas merumuskan internalisasi biaya eksternalitas ini, memaksa manajemen untuk mengalokasikan pencadangan dana pengadaan teknologi filter cerobong asap atau instalasi penyaring limbah (*Waste Water Treatment Plant*) agar beban kerusakan tidak dilimpahkan secara zalim kepada penderitaan masyarakat miskin sekitar.

Keluhuran komitmen manajemen dalam merumuskan penyediaan alokasi anggaran penanganan limbah ekologis ini merupakan jantung penopang arsitektur teori keberlanjutan bisnis atau *Corporate Environmental Responsibility*. Perusahaan dituntut untuk tidak lagi terjebak pada pandangan rabun miopia jangka pendek yang hanya mengagungkan

efisiensi penekanan biaya pembuangan limbah demi penggelembungan laporan laba dividen pemegang saham. Sebaliknya, investasi pada teknologi ramah lingkungan pelestarian peradaban harus diposisikan sebagai strategi pelindung aset kedaulatan reputasi umur perusahaan di masa depan. Ketangguhan implementasi ketersambungan struktur tata kelola pelestarian alam inilah sesungguhnya nyawa penentu jembatan kuat pengikat antara mesin pencetakan laba moneter dengan jaminan kelangsungan kemanusiaan peradaban semesta raya.

Metode Penelitian

Penelitian akademik analitis kualitatif ini sepenuhnya diselenggarakan memanfaatkan kerangka pendekatan arsitektur metodologi riset kualitatif deskriptif yang dipadukan laras selaras bersama desain pengkajian analisis studi kepustakaan literatur secara mendalam. Keseluruhan basis landasan pijakan perumusan penyusunan tumpuan narasi konstruksi teoretis argumentasi data kelayakan bisnis ini digali tajam merujuk pada keabsahan pengelompokan kompilasi validasi deretan referensi publikasi data sekunder bereputasi tingkat kepakaran ilmiah mumpuni. Rujukan referensi sentral kepustakaan ini secara spesifik mencakup arsip buku panduan evaluasi studi kelayakan investasi, regulasi perundang-undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta puluhan artikel jurnal manajemen lingkungan terakreditasi. Alur pelaksanaan tahapan analisis senantiasa berjalan sistematis melintasi metode seleksi pemilahan teks data peraturan, interpretasi rajutan narasi tematik eksternalitas ekologis, dan penarikan wujud kesimpulan konklusi yang objektif.

Hasil dan Pembahasan

Sub Bab 1: Peran AMDAL sebagai Instrumen Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Hukum Fase pengerjaan tahapan pembedahan pelacakan identifikasi rincian analisis pengujian pemenuhan kelayakan indikator aspek lingkungan hidup melalui penyusunan kelengkapan dokumen AMDAL menempati posisi garis ujung perlindungan pertahanan hukum yang amat mutlak sentral kedudukannya. Di dalam realitas operasional birokrasi tata negara, ketiadaan kelengkapan berkas persetujuan pengesahan kelayakan lingkungan dari otoritas lembaga instansi dinas lingkungan hidup daerah akan secara otomatis mengunci membekukan menutup rapat pintu akses pengajuan penerbitan surat izin usaha perdagangan maupun izin mendirikan bangunan fisik. Pengabaian pimpinan manajemen direksi perusahaan untuk mendisiplinkan pemenuhan prasyarat kepatuhan ekologis ini adalah bentuk kecerobohan fatal tindakan bunuh diri yang akan menjerumuskan proyek investasi triliunan rupiah mangkrak seketika menjadi deretan tumpukan puing bangunan liar ilegal cacat hukum.

Strategi perancangan arsitektur penyusunan dokumen pelaporan rincian kerangka pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang tajam sukses membuktikan kemampuannya sebagai peranti navigasi pemetaan deteksi dini peta ancaman bencana. Para pakar penilai kelayakan lingkungan diwajibkan membedah meneliti merumuskan simulasi skenario bahaya kemungkinan terburuk, mulai dari potensi ledakan tangki bahan bakar kimia, kebocoran aliran limbah cair beracun (*Bahan Berbahaya dan Beracun/B3*), hingga pemetaan pergeseran kontur kerawanan longsor tanah di lokasi tapak pendirian pabrik. Ketajaman keakuratan perumusan deteksi identifikasi rincian pemetaan ancaman bahaya letupan ekologis ini memaksa pihak teknisi insinyur kontraktor pembangun proyek untuk merombak menyempurnakan memperkuat spesifikasi ketahanan kualitas material fondasi infrastruktur keselamatan bangunan operasi perusahaan sebelum bencana maut benar-benar terjadi.

Implementasi pengawalan rutinitas operasi komitmen pendisiplinan ketegasan pengawasan jaminan kelancaran jalannya mesin fasilitas infrastruktur perlindungan instalasi saringan pengolahan limbah buangan limbah cair operasional pabrikan industri mutlak dikawal amat sangat ketat oleh hukum. Otoritas penegak hukum lingkungan hidup senantiasa rutin terjun bergegas melakukan patroli inspeksi pengambilan sampel uji baku mutu air pembuangan dari titik muara pipa sisa operasi pabrik yang dialirkan pembuangannya menuju aliran sungai pemukiman rakyat. Apabila hasil pengujian laboratorium mendapati temuan bukti kuat tingkat kepekatan endapan polutan racun melampaui batasan ambang baku mutu ketetapan kelayakan ambang batas toleransi kelestarian air, maka entitas perusahaan secara nyata akan langsung diseret dijerat hukuman sanksi denda pidana pencemaran lingkungan yang berujung penyegelan penutupan pencabutan izin operasi selamanya.

Sebagai wujud konklusi benang penarikan kesimpulan akhir penjabaran ikhtisar paparan argumentasi narasi evaluasi bedah kelayakan peran instrumen AMDAL pada wacana sub bab ini, kebenaran supremasi kepatuhan hukum ekologis terbukti mutlak tak terbantahkan. Kekuatan tingkat komitmen kedisiplinan penjagaan kemurnian menghindari penyisipan unsur pengabaian penghematan pemotongan anggaran biaya penyediaan fasilitas keselamatan limbah terbukti sukses menyumbangkan jaminan keamanan operasi bisnis investasi perniagaan dari hantaman risiko delik pidana tuntutan aparat penegak hukum negara. Keberhasilan instrumen penyaringan kelayakan AMDAL menolak segala wujud perizinan proyek pabrik perusak alam ini menjamin bahwa ekspektasi kelipatan operasi margin *return* yang dinikmati pemegang saham benar-benar murni merupakan refleksi perolehan perputaran niaga yang tunduk pada

penjagaan kelestarian warisan kemakmuran habitat peradaban lingkungan manusia seutuhnya.

Sub Bab 2: Eksternalitas Lingkungan, Reputasi, dan Jaminan Keberlanjutan Bisnis Fase pelaksanaan implementasi perumusan ketegasan perancangan arah haluan arsitektur strategi manajemen pengendalian dampak kerugian eksternalitas sosial ekologis mutlak menuntut kepiawaian seni kepekaan nurani kepemimpinan direksi dalam menyebarkan porsi perhatian kepada masyarakat terdampak. Operasional lalu lalang armada kendaraan truk berat perusahaan tambang atau pabrik yang memicu kepulan polusi debu sesak napas udara kotor dan perusakan kehancuran aspal infrastruktur jalan pedesaan warga sering kali memancing letupan amuk kemarahan sengketa emosional massa. Guna meredam menanggulangi badai ancaman krisis demonstrasi pemblokiran rute penutupan akses pabrik secara sepihak oleh kerumunan masyarakat, manajemen perusahaan diwajibkan sigap cepat tanggap merumuskan ganti rugi pemulihan penyiraman jalan debu rutin dan perbaikan aspal infrastruktur komunal warga. Kolaborasi penyatuan ketegasan operasi pabrik dan kepedulian perbaikan kelestarian fasilitas desa inilah racikan mitigasi sosial paling menjanjikan.

Tantangan pemenuhan jaminan pelestarian kelancaran operasi pembentukan reputasi citra nama baik perusahaan perbankan korporasi penanam modal kini dihadapkan pada masifnya tekanan tuntutan pergeseran paradigma selera pasar kesadaran kampanye konsumen masyarakat kelas menengah global. Gerakan masif kampanye seruan pemboikotan penghindaran pembelian komoditas barang konsumsi yang dicap stempel haram diproduksi dihasilkan dari tindakan pembabatan hutan lindung perawan pembakaran lahan gambut secara sengaja liar merusak paru-paru dunia terbukti sangat mematikan laju omzet kurva penjualan ekspor perusahaan. Penempatan pencadangan ketersediaan komitmen adopsi implementasi penggunaan label sertifikasi operasi ekolabel standar internasional ramah lingkungan hijau ke dalam kemasan susunan kerangka operasional perusahaan terbukti mujarab mengamankan daya tarik nilai jual intrinsik komoditas ekspor dari ancaman bahaya peluruhan daya pikat penolakan pasar kampanye kelestarian alam dunia.

Dinamika peleburan ikatan penyelarasan langkah integrasi sirkulasi penyatuan ekosistem tatanan permodalan industri pasar pembiayaan perbankan modern yang mengikat erat kucuran persetujuan pencairan utang triliunan rupiah dengan kualifikasi pemenuhan penilaian standar kepatuhan lingkungan merupakan pencapaian wujud integrasi mitigasi kelayakan investasi mutakhir. Otoritas perbankan penyedia kucuran modal kredit kini memfasilitasi peluncuran ketersediaan prasyarat ketegasan keharusan lolos uji analisis kelayakan penerapan prinsip kriteria lingkungan sosial dan tata kelola atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

sebelum proposal pengajuan utang disetujui. Kelancaran kemudahan ekspansi pencairan aliran likuiditas investasi modal ekspansi perakitan pabrik baru sukses dihentikan diblokir tertutup rapat manakala perusahaan pemohon gagal membuktikan perumusan mitigasi ketersediaan jaminan teknologi pengurangan jejak karbon emisi beracun. Strategi pengetatan kucuran modal ramah lingkungan inilah pilar pendorong kedaulatan industri hijau era milenial.

Sebagai sebuah rumusan tarikan wujud ikhtisar sintesis konklusi penarikan kesimpulan putusan akhir rangkuman argumen telaah penyusunan narasi penjabaran deskripsi kajian evaluasi bedah kelayakan strategi mitigasi eksternalitas pada uraian pembahasan sub bab penutup tema pilar ini, terbukti nyata esensi pentingnya pembagian kesejahteraan ekologis. Kemampuan kepiawaian ketajaman nalar analisis rasio kecerdasan manajemen perusahaan menyatukan meracik keharmonisan agresivitas kecepatan mesin kapasitas pabrik produksi dengan keandalan benteng kepastian penyediaan anggaran instalasi pengolahan limbah beracun yang dipadukan ketersediaan bantalan penjaga komitmen pemulihan kerusakan fasilitas warga adalah pilar jaminan perlindungan mutlak operasi akumulasi reputasi aset. Ketangguhan implementasi ketersambungan struktur integrasi fusi perputaran kelipatan laba bisnis kapital dengan kepatuhan tanggung jawab pelestarian keamanan bumi lingkungan alam inilah sesungguhnya nyawa penentu kekuatan perisai penjamin kelestarian umur peradaban operasi bisnis abadi.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh paparan uraian penjabaran panjang rentetan hasil telaah kajian analisis evaluasi pelacakan studi historis kepustakaan yang telah direkonstruksi utuh dan mendalam, ditarik konklusi tegas bahwasanya kelestarian kedaulatan umur usia operasional instalasi investasi bisnis perusahaan komersial senantiasa memegang korelasi ketergantungan absolut terhadap kehebatan instrumen evaluasi ketajaman dokumen studi kelayakan pemenuhan aspek lingkungan hidup. Orkestrasi penyatuan fusi kepatuhan pengawalan aturan instrumen kenegaraan dokumen persetujuan pengesahan AMDAL ke dalam perumusan kelancaran izin operasi pabrik terbukti sukses besar menciptakan cetak biru ekosistem pembangunan ekonomi beradab yang tahan sengketa warga komunal, kebal jerat hukum pidana pencemaran, dan mendatangkan reputasi prestisius global hijau. Kesimpulannya, komitmen pemeliharaan pelestarian kelincahan disiplin pencadangan alokasi porsi kekayaan modal investasi khusus bagi penyediaan kecanggihan alat infrastruktur mitigasi instalasi pengolahan limbah racun alam ini sangatlah mutlak dipertahankan teguh guna membentengi keselamatan kelangsungan stabilitas keabadian

kemakmuran integritas peradaban mesin perniagaan bisnis korporasi dari kehancuran penolakan pasar dan murka bencana ekologis alam semesta.

Daftar Pustaka

Behrens, W., & Hawranek, P. M. (1991). *Manual for the preparation of industrial feasibility studies*. United Nations Industrial Development Organization.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.

Fahmi, I. (2014). *Studi kelayakan bisnis dan keputusan investasi*. Alfabeta.

Husnan, S., & Suwarsono, M. (2014). *Studi kelayakan proyek bisnis*. UPP STIM YKPN.

Ibrahim, Y. (2009). *Studi kelayakan bisnis*. Rineka Cipta.

Jakfar, & Kasmir. (2012). *Studi kelayakan bisnis*. Kencana Prenada Media Group.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review, 89*(1/2), 62–77.

Purwana, D., & Hidayat, N. (2016). *Studi kelayakan bisnis*. Rajawali Pers.

Salim, E. (2010). *Pembangunan berkelanjutan: Peran dan kontribusi Emil Salim*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Silalahi, M. D. (2001). *Hukum lingkungan: Dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Alumni.

Suliyanto. (2010). *Studi kelayakan bisnis: Pendekatan praktis*. Andi Offset.

Umar, H. (2005). *Studi kelayakan bisnis: Teknik menganalisis kelayakan rencana bisnis secara komprehensif*. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. (2009). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.